

TAJUK RENCANA

Ketegasan Pemerintah Daerah Menghadapi Pemudik

SUDAH setahun lebih Corona memporandakan negeri ini. Bukan hanya aspek kesehatan yang diserang. Akibat parah tampak di sektor ekonomi termasuk dengan pelbagai pendukung : industri, transportasi, wisata, hotel dan lainnya. Juga dunia pendidikan yang sedang menyiapkan generasi Indonesia Emas.

Tragisnya, sebagian besar di antara kita masih belum bisa disiplin. Gambar pekan lalu yang bertebaran mengenai hiruk pikuk Tanah Abang Jakarta, adalah fakta tidak terelakkan. Dan sekarang? Pemberitaan mengenai kendaraan mudik di minta balik pun terus mewarnai. Seperti diberitakan, dua hari peniadaan mudik Lebaran, 751 kendaraan diminta putar balik (KR, 9/5). Namun hal bukan berarti di daerah tidak ada pemudik. Karena semua telah diasiasi sejak sebelum larangan dimulai dengan diksi : pulang kampung. Dan ribuan perantau yang sudah ada di kampung halaman baik di DIY, Jawa Tengah maupun lainnya.

aman dan terbebas dari pandemi. Muslim dapat menjadi *uswah hasanah* dalam keadaan normal terlebih kala darurat. Jauhi sikap *ananiyah* (egois) dan *ghuluw* (ekstrim) dalam beragama dan menyambut lebaran". (KR, 7/5).

Hanya saja, mudik adalah tradisi setahun sekali sehingga tidak mudah melarangnya. Maka kini yang direpotkan adalah pemerintah daerah. Sehingga, ketegasan daerah menjadi kata kunci kala mudik tak bisa dicegah di tengah pandemi. Kala seruan seakan tidak mempan, Gubernur DIY mengeluarkan surat edaran No 27/SEV/2021 tertanggal 8 Mei yang mengatur detail termasuk optimalisasi fungsi posko Covid-19 kelurahan/kalurahan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak melakukan silaturahmi Idul Fitri. Ketentuannya, dimungkinkan perjalanan antarkabupaten/kota se DIY, melakukan rapidtes PCR/Antigen/GeNose lebih dulu dan menjaga protokol kesehatan 5M. Serta tidak boleh menginap di rumah saudara atau kerabat.

Ketegasan seperti ditunjukkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X sangat perlu dan penting. Karena ini adalah tugas berat pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW untuk konsisten menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan perlu memiliki kemampuan menangkal pemudik dan tidak membiarkan pemudik langsung ke rumah. Jawa Tengah mungkin harus kian mengaktifkan 'Jaga Tangga' dan DIY memaksimalkan 'Jaga Warga'. Karantina 5x24 jam, bagi yang pulang kampung atau lolos mudik, harus diberlakukan.

Harapannya, *ewuh pekewuh* bisa dihilangkan untuk menghentikan tetangga, sekalipun merupakan keluarga terhormat dan disegani. Karena kita tidak ingin, munculnya klaster lebaran di lingkungan kita. □

Budaya Baru Bernama Digitalisasi Sungkem

LARANGAN mudik bagi warga kota ke kampung halaman pada Lebaran 1442 Hijriyah/2021 Masehi, sebagai redunden atas pembatasan serupa pada lebaran tahun sebelumnya. Targetnya Covid-19 tidak berkembang-biak dan Indonesia bebas dari pandemi jilid dua.

Pembatasan mudik sebenarnya cabik-cabik budaya sungkem secara langsung antara anak kepada orangtua, yang muda kepada seniorinya, serta tradisi anjngsana antarwarga, antartetangga. Situasi ini potensial menciptakan dua kondisi yang kontradiktif. Di satu sisi pembatasan mudik yang berulang selama dua tahun bisa mendorong gegar budaya. Di sisi lain pembatasan mudik bisa menciptakan budaya baru yang disebut mediasi sungkem menggunakan teknologi komunikasi atau digitalisasi atau virtualisasi sungkem.

Semangat Kekeberatan

Gegar budaya dipicu penghentian secara paksa kebiasaan lama yang nyata dalam masyarakat. Karena mudik berkorelasi kuat dengan pengayaan elan vital atau semangat kekeberatan, maka pembatasan mudik secara paksa mengganggu kohesivitas antar anggota keluarga maupun antarwarga. Orang menahan rasa rindu keluarga dan kerabat di kampung untuk mentaati larangan mudik pemerintah. Sementara sesama anggota keluarga, antarwarga, antartetangga di kampung sendiri saling membatasi diri, mengurangi aktivitas saling beranjngsana. Khawatir juga ada kerabat, tetangga yang 'mengantarkan' virus.

Pembatasan interaksi tatap muka itu, sejauh ini mendapat solusi atau dikompensasi dengan silaturahmi maupun sungkem yang dimediasi perangkat teknologi informasi melalui digitalisasi sungkem atau virtualisasi sungkem. Iklan-iklan layanan masyarakat di televisi maupun sosial media menggambarkan, warga di kota-kota metropolitan yang dilarang mudik tidak perlu khawatir karena penyedia layanan komunikasi siap untuk memediasi sungkem mereka. Pengalaman menjelang Lebaran 1441

Mukhijab

Hijriyah/2020 Masehi, mediasi sungkem melalui perangkat teknologi komunikasi relatif diterima warga. Fakta itu bisa dikonfirmasi dengan data pelayanan Telkomsel 2020, dimana warga yang memanfaatkan layanan berbasis data menjelang lebaran tertinggi mencapai 26,7 petabyte atau meningkat sebesar 22,8% jika dibandingkan hari normal. Mereka lebih banyak memanfaatkan layanan komunikasi berbasis data sebagai sarana



volume kedatangan di Jawa Tengah sebesar -83%, Jawa Barat -77% , Jawa Timur -83% .

Apakah tren sungkem virtual bakal meningkat pada lebaran tahun 2021? Provider layanan komunikasi memprediksi pelanggan mereka yang melakukan sungkem virtual makin meningkat. Probabilitasnya didukung larangan mudik dari pemerintah yang lebih formal dan *rigit* tahun ini dari segi waktu dan subjeknya, dalam hal ini apparatus sipil dan karyawan badan usaha milik pemerintah maupun warga biasa. Kemudian dari segi waktu, larangan mudik selama dua pekan, 6 – 17 Mei 2021, sementara aturan libur pelayanan kantor oleh apparatus sipil diperpendek waktunya.

Ketika kesadaran tentang urgensi digitalisasi sungkem meningkat untuk mencegah penyebaran Covid-19, apakah bisa dibaca bahwa masyarakat menerima pola baru sungkem tersebut sebagai bagian budaya silaturahmi? Pola baru tersebut belum tentu menjadi budaya pada setiap lebaran. Ketiga situasi pandemi berakhir dan regulasi pulang kampung pada lebaran dibuka, bisa saja saat itu terjadi euphoria mudik sebagai kompensasi dua atau satu kali lebaran tidak mudik. Maknanya, budaya mudik tetap bertahan pada saat situasi normal. Itu berarti juga warga ingin merevitalisasi budaya mudik yang mengalami gegar selama pandemi. □

**) Dr Mukhijab MA, pemerhati masalah sosial, alumni Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Politik UGM*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Serentak Bergerak Merdeka Belajar

MEMPERINGATI Hari Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tema 'Serentak Bergerak Mewujudkan Merdeka Belajar'. Gebrakan merdeka belajar yang sudah diumumkan tahun lalu meliputi Penilaian Ujian Sekolah yang menyeluruh, diadakankanya UN, Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan PPDB dengan sistem zonasi. Untuk mewujudkan merdeka belajar perlu dilakukan secara serentak dan bersinergi.

perbaikan keterampilan sesuai minat dan bakat siswa, serta mengembangkan potensinya.

Pertajam keterampilan abad-21 dengan 4K: Komunikasi, Kritis dalam berfikir, Kreatif dalam pembelajaran, dan Kolaborasi. Komunikasi, melatih komunikasi siswa dalam menyampaikan pesan sesuai dengan etika pergaulan, belajar berwirausaha, komunikasi jejaring sebagai bekal masa depan, selalu belajar public speaking. Kritis dalam berfikir, menyikapi suatu keadaan dengan mengungkapkan hal yang benar, berani menyampaikan pendapat, bertanya, memberikan usulan, dan saran.

Kreatif dalam pembelajaran, siswa dilatih untuk selalu mengembangkan dan berkembang dengan 4M: Memperhatikan, Menirukan, Menambah dan Menularkan. Dengan demikian siswa dipacu untuk selalu dikawal gagasannya untuk difasilitasi agar selalu dinamis dan berkembang sesuai potensi, minat dan bakatnya.

Kolaborasi sebagai makhluk sosial, harus saling bekerja sama, bergotong royong secara kolegiat untuk mewujudkan tujuan serta cita-citanya. Dengan kolaborasi maka pengetahuan dan pengalaman akan saling mengimbaskan satu sama lain, sehingga wawasan siswa akan selalu berkembang dan bertambah terus menerus. Kolaborasi dengan membuat network atau jejaring sehingga hidup akan selalu aktif dan dinamis.

Semoga Hardiknas akan mengelaborasi seluruh komponen masyarakat insan pendidikan untuk bergerak serentak mewujudkan merdeka belajar. Pendidikan Kuat, Indonesia Hebat. □

Eko Mulyadi MSI, Guru Fisika SMKN 3 Yogya.

Mengakhiri Tindak Teror KKB

TIDAK dapat ditawar lagi bahwa dari segi historis, Papua dan Papua Barat merupakan bagian dari NKRI. Dengan mendasarkan pada prinsip *uti possidetis*, Indonesia berhak mengakui bahwa batas wilayah kekuasaan Hindia Belanda saat awal kemerdekaan secara otomatis menjadi bagian wilayah Indonesia, termasuk Papua dan Papua Barat.

Sedangkan dari segi yuridis, dua Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1962 dan 1969 dapat menjadi dasar dukungan rakyat Irian Barat untuk menyatu kedalaman wilayah NKRI. Kedua resolusi ini juga menjadi suatu bentuk pengakuan masyarakat internasional terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkewajiban untuk menjaga agar Papua dan Papua Barat terhindar dari kegiatan separatisme. Aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang meresahkan warga dan menimbulkan kerugian korban jiwa perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Label Teroris

KKB bukanlah belligerensi/pemberontak karena tidak memenuhi kriteria (*legal personality*) sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949. Sehingga, melabeli KKB sebagai teroris oleh Pemerintah sudah tepat secara hukum domestik di Indonesia.

Tindakan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dan perusakan rumah warga di Papua yang dilakukan KKB dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Dodik Setiawan NH

Terorisme menjadi Undang-Undang. Untuk itu, TNI dan Polri dapat segera melaksanakan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum terhadap setiap tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas. Apalagi menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Namun jalur non-kekerasan perlu dioptimalkan. Agar KKB segera mengakhiri tindakan destruktifnya. Namun, jika upaya tersebut gagal, maka tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus senantiasa berlandaskan nilai hak asasi manusia.

Mengingat tindakan terorisme merupakan musuh bersama antar negara maka sangat perlu Pemerintah mengupayakan agar memasukan siapa saja yang tergabung dalam KKB kedalam daftar pelaku teror di PBB (*list of suspected terrorist organizations and individuals*). Daftar ini penting agar setiap negara tidak memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan tindakan terorisme termasuk memberikan bantuan/support dalam bentuk apapun.

Diplomasi

Tentu saja, fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan level keamanan di wilayah yang telah diusik oleh KKB. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua menjadi kunci penting untuk mera-

wat dan menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan yang saat ini sedang diupayakan Pemerintah Jokowi harus dipikatkan tepat sasaran, tidak boleh hanya menguntungkan kelompok elite di Papua. Upaya pembangunan tersebut harus senantiasa dilakukan dengan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Indonesia juga perlu mengintensifkan jalur diplomasi dengan negara-negara Pasifik. Diplomasi tersebut tidak hanya cukup dalam bentuk defensif atau bantahan terhadap setiap pernyataan negara-negara Pasifik dalam forum internasional yang selalu mendukung kemerdekaan Papua dan Papua Barat. Diplomasi yang elegan dapat dilakukan dengan membuka forum dialog resmi untuk saling bertukar pikiran khususnya terhadap isu yang berkaitan dengan Papua. □

**) Dodik Setiawan Nur Heriyanto PhD, Dosen Tetap Fakultas Hukum UII dan Direktur Base for International Law and ASEAN Legal Studies (BILALS).*

Pojok KR

Dua hari peniadaan mudik, 751 kendaraan diminta putar balik -- **Semoga mereka benar-benar balik ke rumah** ***

Kasus Covid-19 di DIY masih fluktuatif -- **Menuntut kewaspadaan dan kesadaran disiplin semua pihak** ***

Pencegahan stunting di Wonosobo hadapi tantangan berat -- **Stunting memang persoalan tidak ringan**

Berats

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemardi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklandkrk23@yahoo.com, iklandkrk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) ... Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percepatan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.